

cek jurnal

202112114_BIMA_AJI_PANGESTU_085977503125.docx

 jurnal

 cek jurnal

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3336958627

Submission Date

Sep 12, 2025, 8:52 AM UTC

Download Date

Sep 12, 2025, 9:08 AM UTC

File Name

202112114_BIMA_AJI_PANGESTU_085977503125.docx

File Size

27.6 KB

7 Pages

1,743 Words

12,069 Characters

0% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 80 words)
- Internet sources
- Publications

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 0%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0%  Internet sources
 - 0%  Publications
 - 0%  Submitted works (Student Papers)
-

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* DI
TAMAN NASIONAL BALURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
(Studi Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2023/PN.Sit)**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF *ILLEGAL
LOGGING* IN BALURAN NATIONAL PARK BASED ON LAW NUMBER
18 OF 2013 ON THE PREVENTION AND ERADICATION OF FOREST
DESTRUCTION
(Case Study of Decision No. 199/Pid.B/LH/2023/PN.Sit)**

Bima Aji Pangestu¹⁾, Yudhistira Nugroho²⁾, Dyah Silvana Amalia³⁾
bimaajip799@gmail.com¹, Dyah_Silvana_Amalia@unars.ac.id²
Yudhistira_Nygroho@unars.ac.id³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku pembalakan liar di Taman Nasional Baluran berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dengan fokus pada Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2023/PN.Sit. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, menggabungkan analisis perundang-undangan, kajian konseptual, serta studi kasus. Temuan penelitian mengungkap bahwa meskipun UU P3H telah memberikan landasan hukum yang tegas, pelaksanaannya di lapangan masih terkendala oleh lemahnya sistem pengawasan, minimnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Dalam putusan yang ditelaah, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun serta denda Rp500.000.000,00 kepada terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan. Peneliti merekomendasikan perlunya penguatan peran lembaga terkait, penindakan tegas terhadap aktor intelektual di balik kejahatan tersebut, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan guna meningkatkan efektivitas perlindungan kawasan konservasi.

Kata kunci: *Illegal Logging*, Penegakan Hukum, Taman Nasional Baluran, UU P3H, Putusan Hakim.

ABSTRACT

This study discusses law enforcement against perpetrators of illegal logging in Baluran National Park based on Law Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction (UU P3H), focusing on Decision No. 199/Pid.B/LH/2023/PN.Sit. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings reveal that although UU P3H provides a clear legal foundation, the implementation of law enforcement still faces several challenges, including weak supervision, lack of coordination among agencies, and low public awareness of the importance of forest protection. In the reviewed decision, the court sentenced the defendant to two years of imprisonment and a fine of IDR 500,000,000, considering justice, legal certainty, and environmental protection. Recommendations include institutional strengthening, prosecution of intellectual actors, and community empowerment around forest areas to enhance the effectiveness of conservation area protection.

Keywords: Illegal Logging, Law Enforcement, Baluran National Park, UU P3H, Court Decision.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kawasan hutan tropis yang sangat luas, yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia. Hutan ini tidak hanya menjadi rumah bagi beragam spesies flora dan fauna, tetapi juga menyediakan berbagai jasa ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat lokal maupun global. Meski demikian, ancaman pembalakan liar (*illegal logging*) masih terus berlangsung, dengan catatan kehilangan hutan mencapai 115.459 hektar per tahun selama periode 2013–2021 (Kementerian LHK, 2022). Salah satu wilayah konservasi yang terkena dampak signifikan adalah Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Kawasan ini terkenal dengan bentang alam savananya dan menjadi habitat satwa dilindungi seperti banteng (*Bos javanicus*), rusa timor, dan merak hijau.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) menjadi landasan hukum dalam menindak pelaku *illegal logging*, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha. Aturan ini mengatur sanksi yang tegas demi menjaga kelestarian hutan. Namun, di Taman Nasional Baluran, efektivitas penerapan UU tersebut masih menjadi pertanyaan. Sejumlah penelitian sebelumnya (Siswanto & Hadwidjojo, 2020; Pamungkas & Jones, 2021) mengungkap kendala berupa lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pengawasan lapangan, keterbatasan

jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat sekitar. Faktor sosial-ekonomi, seperti ketergantungan terhadap hasil hutan sebagai sumber nafkah, turut memperparah kondisi ini (Gunawan et al., 2020).

Salah satu perkara yang menjadi fokus kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 199/Pid.B/LH/2023/PN.Sit. Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah karena mengangkut kayu hasil hutan tanpa dokumen resmi, sehingga melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU P3H. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Pertimbangan hakim mencakup aspek perlindungan lingkungan, kepastian hukum, serta prinsip keadilan.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena berupaya mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum berbasis UU P3H di wilayah konservasi mampu mengatasi hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Analisis tersebut penting untuk menilai apakah penegakan hukum telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan ekologis, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran berulang di masa mendatang.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya hanya meninjau penegakan hukum kehutanan secara umum, kajian ini menggabungkan pendekatan normatif, konseptual, dan studi kasus pada satu putusan pengadilan tertentu. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai praktik penerapan hukum di lapangan. Tujuan utamanya adalah menelaah proses penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Taman Nasional Baluran berdasarkan UU P3H, mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat strategi penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Fokus kajiannya diarahkan pada analisis norma hukum positif, pandangan doktrin hukum, serta

penerapan ketentuan tersebut dalam sebuah putusan pengadilan. Objek yang menjadi pusat pembahasan meliputi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 199/Pid.B/LH/2023/PN.Sit. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, salinan putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait, ditambah dengan penelaahan untuk memperkuat gambaran kondisi penegakan hukum di Taman Nasional Baluran. Seluruh data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan meninjau keterkaitan antara norma yang berlaku, implementasinya di lapangan, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hasil telaah ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum telah sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar di Taman Nasional Baluran yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (UU P3H) telah dijalankan melalui mekanisme pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 83. Dalam perkara yang menjadi fokus analisis, terdakwa terbukti secara sah mengangkut kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen resmi, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU P3H. Perbuatan tersebut dipandang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan kelestarian ekosistem hutan yang memiliki nilai strategis.

Dalam Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2023/PN.Sit, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 dengan ketentuan subsidair tiga bulan kurungan. Selain itu, seluruh barang bukti yang terkait perkara dirampas untuk negara. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim tidak semata-mata didasarkan pada pemenuhan unsur formil tindak pidana, melainkan juga memperhatikan besarnya dampak ekologis, perlunya menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta pentingnya melindungi kawasan konservasi demi keberlanjutan lingkungan hidup sebagai kepentingan bersama.

Unsur Putusan	Uraian
Perbuatan Terdakwa	Mengangkut hasil hutan kayu jati tanpa dokumen sah
Dasar Hukum	Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013
Sanksi	2 tahun penjara, denda Rp500.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan
Pertimbangan Hakim	Kepastian hukum, keadilan, perlindungan lingkungan

Berdasarkan rangkuman putusan, unsur pokok perkara meliputi perbuatan terdakwa yang mengangkut hasil hutan berupa kayu jati tanpa dokumen sah, dasar hukum berupa Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013, sanksi yang dijatuhkan yaitu dua tahun penjara dan denda Rp500.000.000,00 subsidair tiga bulan kurungan, serta pertimbangan hakim yang menekankan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan lingkungan. Analisis ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU P3H, namun efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sekitar hutan.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim melampaui sekadar pembuktian unsur hukum. Hakim turut mempertimbangkan prinsip keadilan ekologis dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan peradilan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Meski demikian, pola ini belum sepenuhnya menyasar aktor intelektual atau pihak pemodal yang berada di balik praktik pembalakan liar.

Jika dianalisis menggunakan kerangka teori penegakan hukum Friedman, terlihat bahwa unsur substansi hukum sudah terpenuhi melalui keberadaan UU P3H yang mengatur secara jelas sanksi dan larangan. Namun, unsur struktur hukum yang berkaitan dengan efektivitas lembaga penegak hukum dan unsur budaya hukum yang menyangkut kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih memerlukan penguatan yang signifikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan perlindungan kawasan konservasi.

Dari perspektif teori keadilan restoratif, vonis yang dijatuhkan cenderung bersifat represif dan belum memaksimalkan sanksi yang berorientasi pada pemulihan ekosistem,

misalnya melalui kewajiban rehabilitasi hutan atau kompensasi terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, meskipun perangkat hukum yang ada sudah memadai, efektivitas penegakan hukum di Taman Nasional Baluran memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pelestarian hutan, dan langkah hukum yang menjerat seluruh rantai pelaku, termasuk pihak-pihak yang berperan sebagai pengendali utama kegiatan *illegal logging*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar di Taman Nasional Baluran yang merujuk pada UU P3H telah dijalankan sesuai prosedur formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terhambat oleh lemahnya sistem pengawasan, kurangnya sinergi antarinstitusi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Keunikan penelitian ini terletak pada perpaduan analisis normatif, konseptual, dan studi kasus, yang mengungkap bahwa majelis hakim telah memasukkan aspek ekologis sebagai pertimbangan hukum. Meski demikian, pendekatan tersebut belum disertai penerapan langkah pemulihan lingkungan yang berorientasi restoratif, sehingga diperlukan perumusan model penegakan hukum yang menggabungkan unsur represif dan restoratif, dengan cakupan penindakan yang mencakup aktor intelektual di balik praktik pembalakan liar.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya strategi penegakan hukum kehutanan yang komprehensif di kawasan konservasi, dengan orientasi ganda pada pemberian sanksi pidana dan pemulihan ekosistem, serta penguatan ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Untuk memperluas perspektif, penelitian lanjutan direkomendasikan dalam bentuk studi komparatif penerapan UU P3H di berbagai taman nasional, sehingga dapat dirumuskan model penegakan hukum yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

Gunawan, A., Setiawan, B., & Hartono, S. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembalakan liar di Indonesia. *Jurnal Hukum Kehutanan*, 7(2), 145–160.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Statistik kehutanan Indonesia 2013–2021*. KLHK.

Pamungkas, D., & Jones, R. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan konservasi. *Jurnal Konservasi Alam*, 5(1), 55–68. Jurnal.dpr.go.id

Siswanto, R., & Hadwidjojo, H. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap penegakan hukum kehutanan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 821–840. [10.24912/erahukum.v16i2.4531](https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4531)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 199/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.